

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU/TERBITAN LEMBAGA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arifin, H. Muzayyin, 1987, *Filsafat Pendidikan Islam*, Buna Aksara, Jakarta.
- Atikah, Ika, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Haura Utama, Banten.
- Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019, *Menggagas Perubahan UU Tipikor : Kajian Akademik dan Draf Usulan Perubahan*, Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta..
- Black, Henry Campbell, 1979, *Black's Law Dictionary with Pronunciations (Fifth Edition)*, West Publishing, Inggris.
- Division for Treaty Affairs United Nations Office on Drugs and Crime, United Nations, 2012, *“Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention against Corruption”*, Vienna.
- Dornbierer, Andrew, 2021, *Illicit Enrichment : A Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth*, Basel Institute on Governance, Basel.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta.
- Hamdan, Muhammad, 2005, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Indonesia Corruption Watch, 2024, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi tahun 2023*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta Selatan.
- Indonesia Corruption Watch, 2014, *UNCAC-Final Draft Policy Paper Illicit Enrichment*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.
- Ismoyo, Jarot, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021, *Komitmen Indonesia Pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan G20 Anti-Corruption Working Group Tahun 2012-2020*, KPK, Jakarta.
- Kristian dan Yopi Gunawan, 2015, *Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat, 2020, *Laporan Studi Kemajuan Implementasi UNCAC di Indonesia Mengenai Pencegahan dan Pengelolaan Benturan Kepentingan*,

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.

Lindy Muzila, *Et. Al.*, 2012, *On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption*, The World Bank, Washington, DC.

Marzuki, P.M., 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

Na'im, Moh. Masyuri, Nur Rofiah dan Imdadun Rahmat, 2006, *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih*, Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

Nurdjana, IGM, 2005, *Korupsi Dalam Praktek Bisnis Pemberdayaan Penegak Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Palma, A.K. *Et. Al.* 2014, *Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara tidak sah) di Indonesia*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.

Purwadarminta, 2010, *Metode dan Tehnik Pembelajaran Partisipatif*, Falah Production, Bandung.

Rifai, Eddy, 2014, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Lampung, Lampung.

Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.

Tompo, Rusdi, 2005, *Ayo Lawan Korupsi*, LBH-P21, Makassar.

United Nations Office on Drugs and Crime, 2011, *Mechanism for the Revuew of Implementation of the United Nations Convention Against Corruption*, United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna.

Zurnetti, Aria, *Et. Al.*, 2021, *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Hukum Pidana Adat (Studi: Hukum Adat Minangkabau)*, Rajawali Pers, Depok.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SUMBER HUKUM LAINNYA

African Union Convention on Preventing and Combating Corruption (diadopsi 1 Juli 2003, mulai berlaku 5 Agustus 2006) 43 ILM 5.

Inter-American Convention Against Corruption (diadopsi 29 Maret 1996, mulai berlaku 6 Maret 1997) 35 ILM 724.

Prevention of Bribery Ordinance (POBO), 1971, Hong Kong.

The Prevention of Corruption Act (PCA), 1988, India Code.

United Nations Convention Against Corruption (diadopsi 31 Oktober 2003, mulai berlaku 14 Desember 2005) 2349 UNTS 41.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* 2003.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana.

C. JURNAL

Mariyanawati, Yessy Artha dan Moh. Saleh, 2023, “*Sistem Pembuktian Terbalik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Perspektif Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Vol. 28, No. 3, 2023.

Marzuki, Hanif, 2021, “*Illicit Enrichment dalam Tindak Pidana*,” , Jurist-Diction, Vol. 4(4), No. 4, 2021.

Miantoro, Bayu, 2020, “*Pengaturan Illicit Enrichment di Indonesia*”, Veritas et Justitia, Vol. 6, No. 7, 2020.

- Ng, Noratikah Muhammad Azman, Et. Al., 2022, *“The Legal Aspect of Illicit Enrichment in Malaysia : Is It A Crime to be Rich?”*, UMM Journal of Legal Studies, Vol. 13, No. 1, 2022.
- O.S Hiariej, Eddy, 2019, *“United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia”*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 31, No. 1, 2019.
- Palma, Alvon Kurnia, Et. Al., 2014, *“Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia”*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hlm. 29 dalam Hanif Marzuki, 2021, *“Illicit Enrichment dalam Tindak Pidana Korupsi”*, Jurist-diction, Vol. 4, No. 4, 2021.
- Putra, Diky Anandya Kharystya dan Vidya Prahassacitta, 2021, *“Tinjauan Atas Kriminalisasi Illicit Enrichment Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia : Studi Perbandingan Dengan Australia”*, Journal on Indonesia Criminal Law Review, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Putri, Novalinda Nadya dan Herman Katimin, 2021, *“Urgensi Pengaturan Illicit Enrichment Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia”*, Jurnal ilmiah Galuh Justisi, Vol. 9, No. 1, 2021.
- Riani, Rahmahwati Silvia dan Joko Jumadi, 2023, *“Pengaturan Illicit Enrichment di Indonesia : Studi Perbandingan Negara Peru”*, Ex Aequo Et Bono Journal of Law, Vol.1, No.1, 2023
- Roman, John dan Graham Farrel, *“Cost and Benefit Analysis for Crime Prevention: Opportunity Cost, Routine Saving, and Crime Externalities”*, Crime Prevention Studies Journal Vol. 14.
- Saputro, Heri Joko dan Tofik Yanuar Chandra, 2021, *“Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran dan Perampasan Aset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi”*, Journal of Islamic Law, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Susilo, Jenny Susmita, Elwi Danil, dan Nani Mulyati, 2023, *“Pemiskinan Koruptor sebagai Alternatif Pidana Tambahan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dikaitkan dengan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset”*, UNES Law Review, Vol. 6, No. 1, 2023.
- Yohanes, Elwi Danil, dan Nani Mulyati, 2023, *“Peran Kejaksaan dalam Perampasan Aset dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaannya”*, UNES Law Review, Vol. 6, No. 1, 2023.

D. TESIS/SKRIPSI

- Salsya, N., 2023, *“Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti pada Kasus Korupsi Revitalisasi Jenjang Seribu Bukit tinggi Terhadap Terpidana yang Meninggal Dunia”* Skripsi Sarjana Universitas Andalas, Padang.

E. INTERNET

- Auliani, Palupi Annisa. “*Hasil Lengkap Audit Kemenkeu atas Rafael Alun Trisambodo dan Progres Kasus Lain*”, <https://money.kompas.com/read/2023/03/09/122722626/hasil-lengkap-audit-kemenkeu-atas-rafael-aluntrisambodo-dan-progres-kasus?page=all>, dikunjungi pada tanggal 12 September 2024 Jam 20.35 WIB.
- Badan Pusat Statistik, “*Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2024 sebesar 3,85 menurun dibandingkan IPAK 2023*”, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/15/2374/-indeks-perilaku-anti-korupsi-ipak--indonesia-2024--sebesar-3-85--menurun-dibandingkan-ipak-2023-.html>, dikunjungi pada tanggal 28 November 2024 Jam 22.50 WIB.
- Berita KPK, “*Hasil SPI 2023: Risiko Korupsi pada Lembaga Pemerintah Cukup Rentan*”, <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/3354-hasil-spi-2023-risiko-korupsi-pada-lembaga-pemerintah-cukup-rentan>, dikunjungi pada tanggal 12 September 2024 Jam 13.42 WIB.
- Bloom News, “*Apa itu Asas Praduga Tak Bersalah*”, <https://fahum.umsu.ac.id/info/asas-praduga-tak-bersalah/>, dikunjungi pada tanggal 14 Desember 2024 Jam 20.49 WIB.
- Ciptowiyono, Isharyanto “*Hukum dan Proteksi Aset Negara*”, <https://www.kompasiana.com/isharyanto/5529c9d0f17e615228d623cc/hukum-dan-proteksi-aset-negara>, dikunjungi pada tanggal 17 September 2024 Jam 14.17 WIB.
- Direktorat Jenderal Keuangan Negara Kementerian Keuangan, “*Pengelolaan Barang Rampasan dan Pemulihan Aset Tindak Pidana*”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/14505/Pengelolaan-Barang-Rampasan-dan-Pemulihan-Aset-Tindak-Pidana.html>, dikunjungi pada tanggal 10 Desember 2024 Jam 13.45 WIB.
- Galih Pratama, “*Beda Tipis, Ini Rincian Kekayaan Sri Mulyani dengan Rafael Alun Trisambodo*”, <https://infobanknews.com/beda-tipis-ini-rincian-kekayaan-sri-mulyani-dengan-rafael-alun-trisambodo/>, dikunjungi pada tanggal 2 November 2024 Jam 14.43 WIB.
- Hukum online, “*Apa Perbedaan Delik Formil dan Delik Materil?*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-membedakan-delik-formil-dan-delik-materil-lt569f12361488b/>, dikunjungi pada tanggal 11 Desember 2024 Jam 20.23 WIB.
- IDN Times, “*40 Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli*”, <https://www.idntimes.com/business/economy/yogama-wisnu-oktyandito/pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-lengkap?page=all>, dikunjungi pada tanggal 12 September 2024 Jam 18.40 WIB.

Klik Legal, “Urgensi Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, <https://shorturl.at/G74CJ>, dikunjungi pada tanggal 3 Desember 2024 Jam 21.39 WIB.

Komisi Pemberantasan Korupsi, “Kapan Periode atau Waktu Penyampaian LHKPN?”, <https://shorturl.at/yJ9iM>, dikunjungi pada tanggal 13 Desember 2024 Jam 20.41 WIB.

Komisi Pemberantasan Korupsi, “Sekilas LHKPN”, <https://www.kpk.go.id/id/layanan/lhkpn>, dikunjungi pada tanggal 6 Desember 2024 Jam 19.18 WIB.

Komisi Pemberantasan Korupsi, “95.29% Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 2024, Capaian Kinerja 2024”, https://www.instagram.com/official.kpk/p/DE7ITG3OqEA/?img_index=1, dikunjungi pada tanggal 18 Januari 2025 Jam 20.58 WIB.

Kompas.id, “Tanpa Ketentuan “Illicit Enrichment”, LHKPN Hanya Jadi Pekerjaan Administratif”, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/26/tanpa-ketentuan-illicit-enrichment-lhkpn-hanya-jadi-pekerjaan-administratif>, dikunjungi pada tanggal 6 Desember 2024 Jam 19.26 WIB.

Kumparan News, “Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli dan Jenis-Jenisnya”, <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-dan-jenis-jenisnya-218pLYM2DzR/full>, dikunjungi pada tanggal 12 September 2023 Jam 18.33 WIB.

LK2 FHUI, “Melihat Masa Depan Regulasi Illicit Enrichment : Sebuah Ancaman Bagi Pejabat Publik Atau Pelanggaran Hak Asasi?”, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/melihat-masa-depan-regulasi-illicit-enrichment-sebuah-ancaman-bagi-pejabat-publik-atau-pelanggaran-hak-asasi/>, dikunjungi pada tanggal 9 Maret 2025 Jam 23.46 WIB.

Nuralam, Candra Yuri. “Rafael Alun Bisa Langsung Jadi Tersangka Jika Illicit Enrichment Berlaku di Indonesia”, <https://www.medcom.id/nasional/hukum/zNAAxIzN-rafael-alun-bisa-langsung-jadi-tersangka-jika-illicit-enrichment-berlaku-di-indonesia>, dikunjungi pada tanggal 12 September 2024 Jam 21.19 WIB.

Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II, “Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)”, <https://web.pn-majalengka.go.id/laporan-harta-kekayaan-pejabat-negara-lhkpn/>, dikunjungi pada tanggal 6 Desember 2024 Jam 19.14 WIB.

Pusat Edukasi Antikorupsi, “Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi”, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>, dikunjungi pada tanggal 2 November 2024 Jam 14.33 WIB.

Simanjuntak, Martha Herlinawati. “Menhan: Korupsi Penyakit “Kronis” Yang Harus Diberantas”, <https://www.antaranews.com/berita/597554/menhan>

[korupsi-penyakit-kronis-yang-harus-diberantas](#), dikunjungi pada tanggal 12 September 2024 Jam 13.24 WIB.

Tjitra, Andry Triyanto. “*Kronologi Lengkap Kasus Rafael Alun: Dari Kasus Penganiayaan hingga Jadi Tersangka KPK*”, <https://metro.tempo.co/read/1709497/kronologi-lengkap-kasus-rafael-alun-dari-kasus-penganiayaanhingga-jadi-tersangka-kpk>, dikunjungi pada tanggal 12 September 2024 Jam 20.18 WIB.

Transparency International Indonesia, “*Indeks Persepsi korupsi Indonesia 2022*”, <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>, dikunjungi pada tanggal 12 September 2024 Jam 18.16 WIB.

UNCAC Coalition, “*UNCAC Review Mechanism*”, <https://uncaccoalition.org/uncac-review/uncac-review-mechanism/>, dikunjungi pada tanggal 28 November 2024 Jam 23.30 WIB.

